

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah perekonomian negara, pasar modal memiliki peranan yang penting dan menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Pasar modal dapat memberikan fasilitas untuk menyatukan dua kepentingan, yaitu investor atau pihak yang memiliki dana dengan emiten atau pihak yang memerlukan dana. Baik emiten maupun investor, keduanya saling membutuhkan. Investor berinvestasi di perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (*return*), sedangkan emiten atau perusahaan menggunakan dana investasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, pasar modal juga dapat memberikan keuntungan (*return*) bagi investor sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Novia *et al.*, 2021).

Investor merupakan komponen penting dalam pasar modal. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya maka pasar modal akan menjadi semakin berkembang. Di Indonesia sendiri jumlah investor pasar modal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada bulan Januari 2021 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mengeluarkan data peningkatan jumlah investor pasar modal yang sangat signifikan. Kenaikan jumlah investor dari 1.619.372 menjadi 2.484.354 atau sekitar 53% terjadi pada akhir tahun 2018 hingga penutupan akhir tahun 2019. Di saat pandemi tahun 2019 hingga 2020 justru jumlah investor jauh bertambah lagi yaitu mencapai 3.880.753 (Mardani, 2020).

Apabila jumlah investor meningkat maka akan meningkatkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada perusahaan. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi oleh investor dengan pengungkapan. Media dalam menyediakan informasi pada perusahaan salah satunya adalah laporan tahunan. Pengungkapan dalam laporan tahunan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang harus disediakan dan dipenuhi oleh perusahaan pada laporan tahunan dimana pengungkapan ini sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan yang secara sukarela disediakan oleh perusahaan di luar peraturan pemerintah yang berlaku. Pihak manajemen akan memberikan informasi yang relevan mengenai perusahaan dan dapat digunakan oleh stakeholders khususnya investor dalam pengambilan keputusan investasi (Neliana, 2018).

Keterbukaan informasi perusahaan sangat penting bagi *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kita hendaknya menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara terbuka. Agar orang yang menerima informasi tersebut dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang harus diambil. Hal ini berkaitan dengan pengungkapan sebuah laporan dalam akuntansi. Seperti pada pengungkapan *forward looking information*. Meskipun bersifat sukarela, perusahaan harus tetap memberikan pengungkapan *forward looking information* kepada pihak yang berkepentingan seperti investor. Ini akan menjadi hal yang positif bagi perusahaan dimata investor.

Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh investor dapat didapatkan melalui laporan tahunan perusahaan, dimana laporan ini merupakan salah satu pengungkapan yang berorientasi ke depan atau disebut Pengungkapan *Forward Looking Information*. Menurut Aljifri & Hussainey (2007) *forward looking information* merupakan sekumpulan informasi yang mengacu pada rencana tahun berjalan dan peramalan masa depan yang dapat digunakan oleh para investor dan pengguna informasi lainnya untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa depan. Pengungkapan *forward looking information* dapat mempermudah investor dalam membuat keputusan investasi karena pengungkapan ini dapat menilai arus kas dan pendapatan perusahaan di masa depan (Muliawati & Rohman, 2018).

Disamping manfaat yang didapatkan perusahaan setelah melakukan pengungkapan *forward looking information*, nyatanya pengungkapan ini bisa berisiko terhadap perusahaan itu sendiri, karena informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak kompetitor. Topik penelitian mengenai determinan pengungkapan *forward looking information* sangat menarik untuk diteliti. Di

Indonesia sendiri riset mengenai topik ini masih relatif terbatas. Riset mengenai fenomena pengungkapan *forward looking information* di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1. 1
Fenomena Pengungkapan *forward looking information* di Indonesia

Peneliti	Sampel	Rata-Rata Pengungkapan FLI
Utami & Wahyuni, (2018)	Laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016	48,76 %
Novia <i>et al.</i> , (2021)	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019	43%
Firmansyah & Irwanto, (2020)	51 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2009	32,06%
Rahmawati & Nur, (2018)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	42,59%
Maghfira & Tresnaningsih, (2017)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012–2013.	32,63%

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan fenomena tersebut rata-rata pengungkapan *forward looking information* di Indonesia kurang dari 50% dan dapat dikategorikan rendah. Menurut Fitri (2016) faktor tata kelola perusahaan menjadi hal terpenting dalam

upaya pengungkapan *forward looking information*. Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu meningkatkan kualitas dari pengungkapan *forward looking information* pada perusahaan.

Menurut Buerthey & Pae (2021) tata kelola perusahaan adalah suatu pengelolaan yang mengarahkan perusahaan untuk bekerja secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independen, kesetaraan, dan kewajaran. Tata kelola perusahaan akan membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mematuhi etika bisnis, serta memenuhi keinginan dari pihak *stakeholders*. Dalam pembentukan strategi pengungkapan yang diinginkan maka dibutuhkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya manager dapat memberikan informasi terkait fakta bisnis kepada para investor seperti pengungkapan *forward looking information* sehingga dapat menghindari masalah asimetri informasi yang berhubungan dengan *principal* dan *agent*.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan tahunan, sehingga perusahaan cenderung akan mengungkapkan *forward looking information* (Al-Najjar & Abed, 2014). Hal ini akan membangun kepercayaan terhadap perusahaan di pasar modal. Sedangkan apabila perusahaan memiliki tata kelola yang buruk nantinya akan menimbulkan masalah yang merugikan perusahaan seperti kasus kecurangan, yang akan menuntut terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Sudah seharusnya setiap perusahaan memiliki sebuah mekanisme tata kelola yang terstruktur dengan baik yang nantinya perusahaan bisa terhindar dari asimetri informasi yang

merugikan bagi perusahaan. Variabel-variabel tata kelola perusahaan yang memengaruhi kebijakan pengungkapan *forward looking information* yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, serta kepemilikan institusional (Fitri, 2016).

Ukuran dewan komisaris adalah proporsi jumlah dewan komisaris pada perusahaan yang berperan dalam mekanisme pengawasan untuk memberikan arahan atau nasihat kepada pihak manajemen atau pengelola perusahaan (Y. N. Sari & Suprayogi, 2022). Keberadaan dewan komisaris dalam jumlah yang besar akan menekan pihak manajemen dalam memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak dari pada perusahaan yang lain (Yanti Ni Luh *et al.*, 2021). Dewan komisaris dalam jumlah yang besar juga akan melakukan pengawasan lebih baik terhadap manajemen sehingga mengurangi risiko kecurangan dalam penyajian laporan keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Agyei Mensah (2017) serta Novia *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*, sedangkan penelitian dari Buertey & Pae (2021) menemukan ukuran dewan komisaris tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Hal ini disebabkan semakin besar dewan komisaris dalam perusahaan akan membuat semakin banyak pendapat yang berbeda dari masing-masing dewan sehingga sulit dalam pengambilan keputusan, melakukan komunikasi, serta koordinasi untuk menyajikan pengungkapan *forward looking information*.

Proporsi dewan komisaris independen mengacu pada komisaris independen yang ada di perusahaan. Independensi dewan diukur dari proporsi direktur independen pada perusahaan. Direktur independen merupakan pihak non-eksekutif yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Fungsi dari keberadaan komisaris independen yaitu untuk melindungi *stakeholders* dari kerugian akibat asimetri informasi, serta dapat meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan (Restu *et al.*, 2017). Peran dari komisaris independen yang netral atau tidak terpengaruh oleh manajemen, akan cenderung mendorong pihak perusahaan dalam mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pihak *stakeholders* (Kilic & Kuzey, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Ajibola (2017) serta Buertey & Pae (2021) menemukan bahwa proporsi dewan independen memiliki dampak secara signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Sedangkan penelitian dari Imelda *et al.*, (2022) menunjukkan proporsi dewan independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Hal ini disebabkan karena masih banyak sekali ditemukan dewan komisaris independen perusahaan namun masih memiliki sifat keberpihakan terhadap pihak tertentu.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga-lembaga keuangan besar. Porsi kepemilikan saham oleh institusi ini biasanya dalam jumlah yang besar sehingga pihak institusi dapat memberikan pengaruh yang besar juga terhadap keputusan manajemen perusahaan. Dalam sistem tata kelola perusahaan, institusi dianggap bagian yang sangat penting. Dengan kepemilikan institusi yang besar ini akan mendorong tingkat pengawasan

terhadap kinerja perusahaan lebih tinggi serta mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan secara transparan termasuk pengungkapan *forward looking information*. Penelitian yang dilakukan oleh Rafifah & Ratmono (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak secara signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Sedangkan penelitian dari Buertey & Pae (2021) menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Hal ini disebabkan karena tidak ada jaminan dari besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional akan membuat perusahaan melakukan pengungkapan yang luas pada laporan keuangan di masa depan.

Remunerasi dewan merupakan sebuah kompensasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan atas kontribusinya kepada perusahaan. Kompensasi ini dapat berupa tunjangan, fasilitas, dan bonus. Pemberian kompensasi kepada dewan direksi dan komisaris dinilai dapat meningkatkan kinerja termasuk dalam pengungkapan *forward looking information* yang lebih transparan dan juga dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang dilakukan oleh Yeo & Suparman (2021) menemukan bahwa *remunerasi* direksi dan remunerasi komisaris memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan *forward looking information*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roudaki (2018) yang menemukan *remunerasi* direksi dan remunerasi komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan karena pemberian kompensasi kepada direksi maupun komisaris dalam jumlah yang besar akan membuat direksi kurang bertanggung jawab untuk terus

meningkatkan kinerjanya sehingga pengungkapan *forward looking information* relatif sama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, masih terdapat kesenjangan penelitian dan ketidaksesuaian hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *forward looking information*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Buertey & Pae (2021) dengan variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan institusional serta menambahkan variabel independen lain yaitu *remunerasi* dewan karena variabel tersebut diduga dapat meningkatkan pengungkapan *forward looking information*. Selain itu, penelitian ini mengubah tahun menjadi 2018-2021 agar lebih relevan. Pada penelitian sebelumnya dilakukan di negara Afrika. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia karena hasil penelitian tentang pengungkapan *forward looking information* menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Tingkat pengungkapan *forward looking information* di Indonesia masih rendah membuat pihak pengguna informasi menuntut perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *forward looking information*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *forward looking information*?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *forward looking information*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *forward looking information*?
4. Apakah *remunerasi* dewan berpengaruh pengungkapan *forward looking information*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *forward looking information*.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *forward looking information*.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *forward looking information*.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *remunerasi* dewan terhadap pengungkapan *forward looking information*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan terhadap bidang keuangan dan tata kelola perusahaan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *forward looking information*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan terkait pentingnya tata kelola perusahaan dan *remunerasi* dewan agar terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pengungkapan *forward looking information*.